

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah

Q.S Al-Baqarah: 224, 225 & 282

B. Buku

Achmad Sulchan. 2016. *Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan*. Semarang: SINT Publishing.

Andi Sofyan & Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.

Bustoro Aly. 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Ilmu.

C.Djismin Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Nuansa Aulia.

Hari Sasangka & Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Hendrastanto Yudowidagdo, dkk. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Melton Putra.

M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo. 2009. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Bandar Maju.

Muladi & Barda Nawawie Arief. 2008. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.

Siwanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Subekti. 2015. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

D. Jurnal

I Putu Krisna Adhi. *Legalitas Personal Chat Pada Social Media Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol.5

I Putu Krisna Adhi. *Rekaman Elektronik Personal Chat Pada Social Media Sebagai Alat Bukti*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol.1

Nur Laili Isma. 2014. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetakannya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.1

Rusyadi. 2016. *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*. Prioris. Vol.5

E. Website

- Ahmad. 2019. *Komunkasi Daring*. Diambil dari <http://www.yuksinau.id/komunikasi-daring/> (19 Oktober 2019)
- Yuli Astuti. 2019. *Pengertian dan Pengaturan Alat Bukti (Perkon)*. Diambil dari https://www.academia.edu/16473052/Pengertian_dan_pengaturan_alat_bukti_Perkon_ (20 Oktober 2019)
- Septian Dwiriadi. 2019. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik*. Diambil dari <https://www.kompasiana.com/septiandwiriadi/592544145293739205cb67e4/implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-penggunaan-alat-bukti-elektronik?page=all> (21 Desember 2019)
- Muhammad Evrizon. 2019. *Analisa Perluasan Alat Bukti Dengan Pengaturan Hukum Acara Di Luar KUHAP*. https://www.academia.edu/7228559/Analisa_Perluasan_Alatt_Bukti_Deengan_Pengaturan_Hukum_Acara_Di_luar_KUHAP (21 Oktober 2019)
- Rezky Febriyani. 2019. *Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016*. Diambil dari <https://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undang-no11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi> (21 Desember 2019)
- Sitompul, Josua. 2019. *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/> (19 Desember 2019)

F. Lain- Lain

- Achmad Sulchan. Bahan Ajar Hukum Acara Pidana. Fakultas Hukum Unissula 2019.
- Surat Edaran Kementerian Kehakiman RI Nomor 39/TU/88/102/Pid. Yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 1988